

## Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Air Bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura

Revika Silviani<sup>1\*</sup>, Fitri Eriyanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Padang, Padang

\*email: [revikasilviani09@gmail.com](mailto:revikasilviani09@gmail.com) [fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id](mailto:fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id)

### Citation:

Silviani, R., Eriyanti, F. (2023). Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Air Bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura. *Administrasi PemerintahanDesa*, 4(2), 173-182. doi: Prefix [10.47134](https://doi.org/10.47134)

Editor: Yusuf Adam Hilman

Received: May 31, 2023

Accepted: August 17, 2023

Published: August 18, 2023

Publisher's Note: Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Licensee Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Kajian ini dilakukan untuk membahas terkait faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program air bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Dan informan penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini adalah faktor pendukung dan penghambat Collaborative Governance dalam pelaksanaan program air bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukung pelaksanaannya adalah kualitas SDM dalam pelaksanaan, ketersediaan dana pelaksanaan, partisipasi masyarakat setempat dan proses transparansi dalam berkolaborasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan masih terdapat ego sektoral pada masing-masing stakeholder.

**Kata kunci:** Pendukung, Penghambat, Pelaksanaan, Program Air Bersih

**Abstract:** This study was conducted to discuss the supporting and inhibiting factors in implementing the clean water program in Nagari Tluk Amplu Inderapura, Pancung Sol District. This research was prepared using a qualitative approach and using a descriptive method. And the research informants used purposive sampling techniques. The results of this study are the supporting and inhibiting factors of Collaborative Governance in implementing the clean water program in Nagari Tluk Amplu Inderapura. The findings in this study indicate that the supporting factors for its implementation are the quantity of human resources in implementation, availability of implementation funds, local community participation and transparency in collaborating. While the inhibiting factor is the lack of public awareness, there is sectoral ego in each stakeholder.

**Keywords:** Supporters, Obstacles, Implementation, Clean Water Program

## 1. Pembahasan

*Collaborative governance* merupakan pola yang tepat untuk membahas kepemilikan bersama, keahaman peran antar aktor untuk menangani permasalahan di daerah (Bae et al., 2016; Kim, 2016; Sønderkov, 2019). Collaborative governance merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Senada dengan yang dijelaskan oleh Donahue dan Zeckhauser (2011) bahwa collaborative governance merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan public melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Holzer et al (2012) juga menyatakan bahwa collaborative governance adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat. Collaborative governance juga dapat digambarkan keadaan saling ketergantungan dan menjalin hubungan yang erat satu sama lain (Gallardo et al., 2013; Ibrahim et al., 2020, 2022; Zeppel, 2012). Setelah para aktor berkomitmen dan berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama agar tercipta kolaborasi yang berkualitas. Stakeholder yang terlibat dalam proses collaborative governance adalah pemerintah, swasta, masyarakat yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian consensus melalui interaksi formal dan informal sesuai dengan peraturan dan norma dalam interaksi yang saling menguntungkan (Gestel & Grotenbreg, 2021; Greenway, 2021; Gugu & Dal Molin, 2016; Margerum et al., 2019).

Salah satu bentuk *Collaborative Governance* adalah kolaborasi yang dilakukan oleh PT Incasi Raya, Pemerintahan Nagari Tluk Amplu Inderapura dan Puskesmas Inderapura. Tujuan dilakukan kolaborasi ini yaitu untuk mensukseskan pelaksanaan program air bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal. Kondisi air bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura dapat disebut tidak layak untuk digunakan, karena sebagian masyarakat Nagari Tluk Amplu Inderapura masih ada yang menggunakan sumur gali yang airnya masih keruh sehingga sebelum penggunaan air masyarakat menyaring terlebih dahulu (Bain & Landau, 2019; Yoder et al., 2021). Dari permasalahan tersebut PT Incasi Raya dari perusahaan setempat mengeluarkan

bantuan CSR berupa program air bersih yang dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah nagari dan puskesmas untuk mensukseskan pelaksanaan program air bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal.

Bantuan program air bersih yang diberikan oleh PT Incasi Raya kepada Nagari Tluk Amplu Inderapura, dalam melakukan pelaksanaannya melibatkan seluruh stakeholder yaitu dari pihak swasta, pemerintah nagari, puskesmas dan masyarakat juga ikut terlibat didalamnya. Pelaksanaan yang dilakukan diantaranya pemeriksaan kondisi air bersih rumah warga, merencanakan pembangunan program air bersih, menyiapkan dan melaksanakan program air bersih, mengoperasikan program air bersih dan memelihara dan menjaga sarana program air bersih yang telah dibangun (Bradley et al., 2022; Panday, 2018; Zhang et al., 2022).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dalam melakukan kolaborasi tentu akan ada faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan terhadap objek kolaborasi. Seperti kolaborasi dalam pelaksanaan program air bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura, dalam melakukan pelaksanaan terdapat beberapa faktor pendukung yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program air bersih diantaranya adanya kualitas SDM yang membantu pelaksanaan program air bersih yaitu melibatkan KKM yang dibuat untuk kelancaran pelaksanaan program air bersih, adanya ketersediaan dana dalam membangun sarana program air bersih dari pihak swasta, dan proses kolaborasi yang transparan sehingga dalam pelaksanaan kolaborasi tidak menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Namun terdapat juga faktor penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi diantaranya keterbatasan dana dalam proses pembayaran token air bersih, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran token air bersih dan terdapatnya ego sektoral antar stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program air bersih.

Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dalam pelaksanaan program air bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal.

## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sekretaris nagari tluk amplu Inderapura, kasi pemerintahan nagari tluk amplu Inderapura, koordinator KKM tluk amplu Inderapura, koordinator humas PT Incasi Raya, Sekretaris humas PT Incasi Raya, Koordinator KKM, Koordinator tim kesling Puskesmas dan Masyarakat. Informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini dilakukan dengan mempertimbangkan informan yang akan memberikan data secara maksimal. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan informan, melakukan observasi di lokasi penelitian, dan studi dokumentasi menggunakan HP. Untuk uji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi sumber. Untuk analisa data peneliti menggunakan analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan.

## 3. Data dan Pembahasan

### a. Faktor Pendukung Kolaborasi

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang menjadi dorongan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung proses kolaborasi dalam pelaksanaan program air bersih Nagari Tluk Amplu Inderapura diantaranya

*Pertama*, Kualitas Sumber Daya Manusia. Menurut Imam Mulyana (2010 : 96) kualitas adalah: Sebagai kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Selanjutnya SDM menurut Malayu S.P Hasibuan (2012:244) sumber daya manusia adalah: Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya.. Kemudian M. Dawam Rahardjo (2010:18) menjelaskan pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu: Kualitas sumber daya

manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. Dalam melakukan pelaksanaan program air bersih kualitas SDM menjamin lancarnya pelaksanaan program air bersih. Disini SDM yang berkualitas yang ditunjuk menjadi KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) yaitu masyarakat yang dipercaya melakukan suatu tugas dalam organisasi. Sehingga masyarakat tersebut mampu menjalankan tugasnya, karena sudah terbiasa didalam bidangnya.

*Kedua*, Ketersediaan dana pembangunan sarana program air bersih. Dana adalah uang yang disediakan untuk keperluan tertentu. Dana adalah himpunan uang disediakan untuk tujuan tertentu. Dana dapat disediakan untuk banyak tujuan, misalnya oleh pemerintahan demi proyek pembangunan, perusahaan ketika meluncurkan suatu produk, atau individu dalam melakukan investasi. Untuk mendukung pelaksanaan program air bersih dan disediakan dari pihak swasta selaku penyedia bantuan program air bersih. Dimana dana yang disediakan hanya untuk pembangunan sarana program air bersih. Setelah diberikan dana tersebut disetiap rumah warga yang mendapatkan bantuan program air bersih sudah terdapat sarana air bersih dimasing-masing rumahnya.

*Ketiga*, Partisipasi masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dalam pelaksanaan program air bersih kepedulian masyarakat dalam membangun sarana program air bersih dapat diapresiasi, karena

mereka sebagai warga setempat mau berpartisipasi untuk melakukan pembangunan sarana program air bersih. Masyarakat tersebut ikut bergotong royong dalam melakukan pembangunan seperti ikut mengolah bahan material dan memasang pipa air bersih. Sehingga pelaksanaan tersebut dapat berjalan sesuai yang dikehendaki.

*Keempat*, Proses transparansi dalam kolaborasi. Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Dalam melakukan kolaborasi pelaksanaan program air bersih transparansi dilakukan oleh setiap stakeholder, agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada setiap tim yang bertugas, semua pengeluaran yang dilakukan disampaikan pada rapat pertemuan setelah dilakukan pembangunan program air bersih.

#### **b. Faktor penghambat kolaborasi**

Hal yang memiliki arti yang berhubungan dengan kendala yaitu hambatan, kamus besar Bahasa Indonesia (1990 : 235), menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karena hanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan. Jadi, Kendala ataupun hambatan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah :

*Pertama*, Keterbatasan dana untuk membayar token air. Dana sangat diperlukan dalam melakukan sebuah program, begitupun dalam pelaksanaan program air bersih ini. Dana yang diberikan oleh pihak swasta hanya untuk melakukan pembangunan program air bersih dan pembayaran token diawal selesai pembangunan, setelah itu pembayaran token diserahkan kepada pihak nagari untuk mengelolanya. Sehingga, peran pemerintah nagari disini yaitu meyakinkan masyarakat untuk mau membayar token air bersih tersebut agar pengoperasian program air bersih yang sudah diberikan dapat dilanjutkan seterusnya tanpa harus terhenti.

*Kedua*, Kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat disini yaitu dalam membayar token air, sebagian masyarakat enggan membayar token air dan dalam hal ini peran pemerintah nagari harus bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembayaran yang dilakukan masyarakat adalah untuk masyarakat untuk sendiri.

*Ketiga*, adanya ego sektoral dari masing-masing *stakeholder* terkait. Dalam organisasi pemerintahan atau perusahaan, ego sektoral dan mentalitas silo berpotensi menjadi kontraproduktif terhadap strategi pencapaian target dan tujuan organisasi. Meskipun demikian, dalam penyusunan rencana dan strategi organisasi, telah menjadi kebiasaan bahwa organisasi menetapkan target kinerja untuk masing-masing unit diturunkan dari target dan tujuan utama organisasi. Ego sektoral ini terjadi dikarenakan masing-masing aktor kolaborasi pelaksanaan program air bersih lebih berfokus kepada tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga, menjadi salah satu penghambat kelancaran pelaksanaan program air bersih karena tidak adanya kontribusi untuk membantu satu sama lain.

#### **4. Kesimpulan**

Faktor pendukungnya yaitu adanya SDM yang mampu membantu proses kolaborasi terdapat KKM yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan program air bersih, Ketersediaan dana pembangunan sarana program air bersih dari pihak swasta, adanya partisipasi masyarakat setempat dan proses transparansi dalam kolaborasi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan dana untuk membayar token air, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar token air dan adanya ego sektoral dari masing-masing *stakeholder* terkait.

#### **5. UcapanTerimakasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu selama penulisan artikel ini adalah Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.pd, P.hD selaku dosen pembimbing.

## 6. Daftar Pustaka

- Bae, Y., Joo, Y.-M., & Won, S.-Y. (2016). Decentralization and collaborative disaster governance: Evidence from South Korea. *Habitat International*, 52, 50–56.  
<https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.08.027>
- Bain, A. L., & Landau, F. (2019). Artists, Temporality, and the Governance of Collaborative Place-Making. *Urban Affairs Review*, 55(2), 405–427.  
<https://doi.org/10.1177/1078087417711044>
- Bradley, S., Mahmoud, I. H., & Arlati, A. (2022). Integrated Collaborative Governance Approaches towards Urban Transformation: Experiences from the CLEVER Cities Project. *Sustainability (Switzerland)*, 14(23).  
<https://doi.org/10.3390/su142315566>
- Gallardo, M. V. I., Helsley, J., Pinel, S., Ammon, J., Rodriguez, F. V. L., & Wendland, K. (2013). Collaborative community-based governance in a transboundary wetland system in the Ecuadorian Andes. *Mountain Research and Development*, 33(3), 269–279. <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-12-00120.1>
- Gestel, N. V., & Grotenbreg, S. (2021). Collaborative governance and innovation in public services settings. *Policy and Politics*, 49(2), 249–265.  
<https://doi.org/10.1332/030557321X16123785900606>
- Greenway, J. (2021). Place-based collaborative governance: The potential influence of governments. *Geographical Research*, 59(3), 349–361. <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12475>
- Gugu, S., & Dal Molin, M. (2016). Collaborative Local Cultural Governance: What Works? The Case of Cultural Districts in Italy. *Administration & Society*, 48(2), 237–262.  
<https://doi.org/10.1177/0095399715581037>
- Ibrahim, A.-S., Akanbang, B. A. A., & Laube, W. (2022). Sustaining decentralized collaborative governance arrangements in Africa: a case study of land management committees in the Upper West Region, Ghana. *GeoJournal*, 87(2), 641–660.  
<https://doi.org/10.1007/s10708-020-10276-3>
- Ibrahim, A.-S., Akanbang, B. A. A., Nunbogu, A. M., Kuusaana, E. D., & Ahmed, A. (2020). Collaborative customary land governance: Motivations and



- challenges of forming land management committees (LMCs) in the upper west region of Ghana. *Land Use Policy*, 99.  
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105051>
- Kim, S. (2016). The workings of collaborative governance: Evaluating collaborative community-building initiatives in Korea. *Urban Studies*, 53(16), 3547–3565.  
<https://doi.org/10.1177/0042098015613235>
- Margerum, R. D., Lewis, R., & Dobrinich, S. (2019). Collaborative metropolitan governance: An evaluation of local adoption in Denver. *Cities*, 93, 136–144.  
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.04.010>
- Panday, P. (2018). Making innovations work: local government–NGO partnership and collaborative governance in rural Bangladesh. *Development in Practice*, 28(1), 125–137.  
<https://doi.org/10.1080/09614524.2018.1401588>
- Sønderskov, M. (2019). Do local politicians really want collaborative governance? *International Journal of Public Sector Management*, 32(3), 320–330.  
<https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2017-0271>
- Yoder, L., Ward, A. S., Spak, S., & Dalrymple, K. E. (2021). Local Government Perspectives on Collaborative Governance: A Comparative Analysis of Iowa's Watershed Management Authorities. *Policy Studies Journal*, 49(4), 1087–1109.  
<https://doi.org/10.1111/psj.12389>
- Zeppel, H. (2012). Collaborative governance for low-carbon tourism: Climate change initiatives by Australian tourism agencies. *Current Issues in Tourism*, 15(7), 603–626. <https://doi.org/10.1080/13683500.2011.615913>
- Zhang, Q., Ye, C., & Duan, J. (2022). Multi-dimensional superposition: Rural collaborative governance in Liushe Village, Suzhou City. *Journal of Rural Studies*, 96, 141–153. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.10.002>
- Agranoff, R, and McGuire, M. 2009. Collaborative Public Management. Washington DC: Georgetown University Press.
- Astuti, R.S, Hardi, W & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang : Universitas Dipenogoro Press
- Deddy Mulyana.2010.Pengantar Ilmu Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Depdikbud. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Donahue, J. D. & Zeckhauser, R. J. 2011. Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals in Turbulent Times. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Yogyakarta : Pustaka. Pelajar.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). *An Integrative Framework for Collaborative. Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access*, 1-29.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2012. Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental Governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31(1), 297–325.
- M. Dawam Rahardjo.2010. Intelektual, Intelegasi, dan Perilaku Politik dan Bangsa. Bandung: Mizan
- Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sudarmo. (2011). Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance. Surakarta: Smart Media..